

ANALISIS HUKUM RENCANA REGULASI PENERAPAN STUDENT LOAN DI INDONESIA

Oleh: Stevanus Hizkhia Gunawan¹, Virga Dwi Efendi²

INTISARI

Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis apakah mekanisme *Student Loan* dapat diterapkan di Indonesia berdasarkan peraturan perundangan yang ada, baik secara positivis dan filosofis. Kemudian penulisan hukum ini juga bertujuan untuk menganalisis dan memberikan saran perihal konsep yang paling ideal terkait penerapan *student loan* di Indonesia berdasarkan Hukum dan Kebijakan Publik serta untuk menganalisis kebijakan seperti apa yang perlu diterapkan agar Pendidikan Tinggi dapat lebih terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian berjenis Yuridis-Normatif yang bersifat Deskriptif. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber kepustakaan yang ada seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, artikel, dan berita. Kemudian Pendekatan yang digunakan untuk meneliti Rumusan Masalah 1 akan lebih condong dengan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Sejarah (*Historical Research*). Kemudian pada Rumusan Masalah 2 pendekatan yang akan digunakan adalah Pendekatan Study Kasus (*Study Case Approach*) dan Pendekatan Komparasi (*Comparative Approach*).

Penelitian hukum ini menemukan dua kesimpulan. *Pertama*, Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemangku Kebijakan Tertinggi di Indonesia harus berhati-hati dan mengkaji betul terkait kebijakan *Student Loan* di Indonesia, mengingat banyaknya amanat yang berkaitan dengan pendidikan di sepanjang sejarah berdirinya Republik Indonesia dan bahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. *Kedua*, *Student Loan* terbukti berhasil di beberapa negara, tapi juga terbukti gagal di beberapa negara lain. Perancangan kebijakan publik terkait *Student Loan* harus dapat disusun secara akademis dan dipertanggung jawabkan, mengingat Indonesia Emas 2045 akan bersandar kepada bonus demografi dan tentu kualitas Sumber Daya Manusia yang ada pada saat tersebut.

Kata Kunci: *Student Loan*, Pendidikan, Kebijakan Publik.

¹ Mahasiswa Strata Satu (S-1) pada Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Dosen pada Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Legal Analysis of Indonesia's Student Loan Plan and Regulation

Author : Stevanus Hizkhia Gunawan¹, Virga Dwi Efendi²

ABSTRACT

This legal essay aims to analyze the mechanisms by which Student Loans may be applied in Indonesia within the existing legal framework, using both positivist and philosophical approaches. The objective of this essay is also to provide an analysis and offer potential suggestions for the most ideal concept for implementing student loans in Indonesia, based on Law and Public Policy. Additionally, it aims to analyze the types of policies necessary to make higher education more accessible to the entire Indonesian population.

This research is a normative juridical study of a descriptive nature. Gathering of evidence from various library sources comprising books, journals, laws and regulations, articles and news articles. Then, the approach used to examine Research Question 1 will lean more towards the Statute Approach and the Historical Approach. For Research Question 2, the approaches that will be used are the Case Study Approach and the Comparative Approach.

This legal study contains two consecutive conclusions. First, the Government of the Republic of Indonesia as the Highest Authority in Indonesia has to be careful and thoroughly study the Student Loan policies in Indonesia, as there are many mandates related to education throughout the history of the Republic of Indonesia since its establishment; even as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law (UU) Number 12 of 2012 concerning Higher Education. Secondly, Student Loans have proven successful in some countries, but have also proven unsuccessful in other countries. The formulation of Public Policy concerning Student Loan necessitates academic involvement and must be accountable, as Indonesia Emas 2045 will rely on the demographic bonus and the quality of human resources available at that time.

Keywords: Student Loan, Education, Public Policy.

¹ Undergraduate Student of Administrative Law Departement, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

² Lecture in Administrative Law Departement, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.